



Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Sebagai Countercyclical dalam Upaya Menyelamatkan Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19 di Kabupaten Badung

*I Gusti Agung Ayu Yuliantika Dewi** dan *Ida Bagus Gde Indra Wedhana Purba*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*agungyuli14@gmail.com

Abstract

Tourism has become a mainstay sector in development in the Province of Bali. The contribution of tourism to the economy is quite high. At the end of 2019 tourist visits and international tourists experienced a significant decline due to the Covid-19 pandemic which caused the collapse of Bali tourism, especially in Badung Regency as a major tourist destination. Facing an increasingly difficult economic situation amid the outbreak of the Corona virus, the Financial Services Authority has begun to implement a policy of providing stimulus to the economy with the issuance of POJK No.11/POJK.03/2020 National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy as a result of the spread of Covid-19. This POJK is expected to be a policy that is able to maintain economic stability and maintain economic growth for the Balinese people, most of whom are engaged in the tourism sector, especially in Badung Regency. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. Primary data obtained through the process of observation, interviews, and documentaries. The selection of informants was done by purposive sampling. Data validation is done by triangulation of data sources so that the data presented is valid data. The results of this study describe the implementation of the policy stimulus as a countercyclical in an effort to prevent tourism actors causing the COVID-19 pandemic and describe the supporting and inhibiting factors of this policy.

Keywords: *policy implementation; economic stimulus policy; tourism actors.*

Abstrak

Pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunan di Provinsi Bali. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian tergolong tinggi. Akhir tahun 2019 kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan internasional mengalami penurunan secara signifikan disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tumbangannya pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Badung sebagai kawasan tujuan wisata utama. Menghadapi situasi perekonomian yang semakin sulit ditengah mewabahnya virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical sebagai dampak dari penyebaran Covid-19. POJK ini diharapkan menjadi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas perekonomian, menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali yang sebagian besar bergerak di sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui proses observasi, dan wawancara, dan dokumenter. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dalam upaya menyelamatkan pelaku pariwisata yang terdampak pandemi covid-19 serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan ini.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; kebijakan stimulus perekonomian; pelaku pariwisata

Pendahuluan

Harus diakui bahwa dewasa ini, sektor pariwisata memainkan peran yang sangat besar dalam mendatangkan devisa bagi negara. Setidak-tidaknya dalam dua dekade terakhir, pembangunan di Indonesia bertumpu pada sektor pariwisata (Paramita & Putra, 2020). Di antara berbagai daerah di Indonesia yang memberikan sumbangan bagi devisa negara dari sektor pariwisata, Bali merupakan penyumbang devisa terbesar dari sektor ini. Hal ini memberikan suatu kepastian bahwa Bali sangat diprioritaskan sebagai tujuan wisata destinasi dunia dan digemari oleh wisatawan dunia (Paramita & Putra, 2020). Hal ini dapat dibuktikan melalui kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang setiap tahunnya kembali mengalami peningkatan.

Pariwisata diharapkan dapat membawa berbagai manfaat yang cukup berarti dalam pembangunan, karena berbagai kegiatan dalam bidang kepariwisataan dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan bagi masyarakat suatu wilayah. Demikian pula bagi Kabupaten Badung pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunan. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Badung tergolong tinggi (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Sepanjang tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 16,11 juta, angka ini naik 1,88% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta. Kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2019 paling banyak berasal dari Malaysia sebanyak 2,98 juta (18,51%) yang kemudian diikuti oleh China sebesar 2,07 juta (12,86%) (Budiyanti, 2020). Sejak merebaknya virus corona, selain memberlakukan kebijakan pembatasan impor hewan hidup dari China, Pemerintah juga menghentikan penerbangan dari dan ke China per 5 Februari 2020. yang tentunya hal ini juga akan memengaruhi sektor pariwisata Indonesia. Banyak perusahaan travel dan penerbangan yang mengalami kerugian akibat penghentian penerbangan dari dan ke China. Sejak adanya pemberlakuan tersebut, saat ini jumlah kunjungan wisatawan China ke Bali mengalami penurunan. Pada tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, sebanyak 1.185.519 wisatawan atau 18,2% berasal dari China. Namun pada Januari sampai pertengahan Februari 2020 tercatat 22.000 wisatawan China batal ke Bali. Hal tersebut sangat memengaruhi perekonomian Provinsi Bali (Budiyanti, 2020).

Menghadapi situasi perekonomian yang semakin sulit ditengah mewabahnya virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Saat ini tingkat hunian hotel di Badung hanya mencapai 20 persen dari total 146.000 kamar yang ada. Pihak hotel membutuhkan stimulus dalam kondisi anjloknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ini (Purwahita, Wardhana, Ardiasa, & Winia, 2021). Dengan kebijakan moneter yang digulirkan ini, harapannya bisa memberikan ruang relaksasi bagi para debitur di Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebutlah, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian sebagai *Countercyclical* dalam Upaya Menyelamatkan Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19 di Kabupaten Badung".

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka diharapkan peneliti dapat lebih menelusuri dan mengeksplorasi Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian sebagai *Countercyclical* dalam Upaya Menyelamatkan Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19 di Kabupaten Badung. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor pengambat dari implementasi kebijakan ini.

Dalam penelitian kualitatif diperlukan yang disebut dengan triangulasi data. Triangulasi atau dapat disebut juga dengan *recheck* atau *cross check* adalah usaha mengecek data yang diperoleh dilapangan dengan informan lain untuk lebih memahami kompleksitas fenomena sosial. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan yakni Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Kepala Dinas Pariwisata, kepala dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan perwakilan masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang sudah ada dan tidak secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut dapat berupa data dari riset lain, majalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Teknik Pengumpulan Data yakni wawancara, dan observasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang diteliti, menghubungkan keterkaitan antar fenomena yang diteliti kemudian menganalisis temuan-temuan di lapangan Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, melakukan pemusatan terhadap fokus yang dianalisis yaitu dengan mencari data, mengelompokkannya, dan memilih data yang penting dan data yang tidak penting. Kedua, mengecek data yang didapatkan dengan meng *cross-check* suatu informasi yang didapat dari satu informan pada informan yang lainnya sehingga bisa mendapatkan data yang benar-benar valid. Ketiga, melakukan penyajian data secara sistematis. Maksudnya dengan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai data yang disajikan. Keempat, melakukan penarikan kesimpulan dari keterkaitan antar fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Pariwisata di Kabupaten Badung saat Pandemi Covid-19

Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah untuk menutup sementara berbagai objek wisata di daerah tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Penutupan itu dilakukan sesuai dengan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 556/1887/Dispar/Sekret yang juga memperhatikan Surat Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dan seruan dari Gubernur Bali untuk membatasi pergerakan wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata dan desa wisata di wilayah Kabupaten Badung. Objek wisata yang ditutup ini merupakan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat, lembaga, maupun pemerintah. Penutupan akan berlangsung mulai 21-31 Maret 2020 sembari melihat perkembangan kasus Covid-19.

Industri pariwisata jadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19, banyak bisnis yang terancam ditutup akibat adanya pembatasan perjalanan dan pemberlakuan *lockdown* di banyak negara didunia. Karyawan yang dirumahkan juga terus bertambah, banyak pemilik industri pariwisata seperti hotel, villa, restoran tidak mampu lagi memberikan gaji untuk karyawannya, periode ini jadi momen yang tepat bagi pelaku pariwisata untuk bisa memperkuat diri.

Kebijakan Penetapan Kualitas Aset dan Kebijakan Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, terdapat Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi pertama kebijakan penetapan kualitas aset kedua kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Untuk mengetahui implementasi dari kedua kebijakan diatas peneliti melakukan wawancara dengan otoritas jasa keuangan sebagai lembaga negara yang mengeluarkan peraturan ini fungsinya untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagai penyelenggara dari pelaksanaan kebijakan ini dan beberapa perwakilan dari pelaku pariwisata di Kabupaten Badung sebagai pihak yang merasakan langsung dari implementasi kebijakan ini.

Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi pertama kebijakan penetapan kualitas aset kedua kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, seluruh bank tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank (Wilson, 2006). Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19 dan sektor yang terkena dampak Covid-19.

Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian sebagai Countercyclical Kabupaten Badung

Menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975) maka implementasi kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan ini menasar semua pelaku pariwisata terdampak covid-19 baik itu sebagai pekerja maupun pemilik usaha pariwisata, tentu saja dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kebijakan tersebut. Kebijakan ini diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Dari sisi sumber daya kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur. Cara pihak pelaksana dalam mengelola program-program yang berkaitan dengan stimulus perekonomian di lembaga perbankan yaitu dengan memberikan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau, konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan ini, bisa dilihat dari Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dilihat dari komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. ketepatan komunikasi dengan para pelaksana serta konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan karena kebijakan ini turunan dari pemerintah Republik Indonesia sudah jelas tujuannya untuk membantu masyarakat dan lembaga perbankan harus melayani masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Terakhir dari sisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan ini berpengaruh di lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat karena memang tujuan kebijakan ini untuk membantu kreditur sekaligus debitur, khususnya pelaku pariwisata yang terdampak pandemi covid-19 untuk bisa melakukan negosiasi penurunan suku bunga dan kemudahan lainnya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan (Winarno, 2005; Winarno, 2008). Ada dua hal yang dapat menghambat kebijakan stimulus perekonomian di masa pandemi covid-19 ini yaitu ketidakmampuan untuk bertahan dan tidak adanya persiapan dari para pelaku pariwisata. Optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan, pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem (Wahab, 2014; Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Simpulan

Ukuran dan tujuan kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh staf pelaksana namun belum ada ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai proses implementasi program ini. Sumber daya, jika dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah cukup baik. Namun, dari sumber daya waktu, masih perlu perbaikan karena banyak pelaku pariwisata yang belum memanfaatkan program dalam kebijakan stimulus perekonomian ini. Karakteristik agen/badan pelaksana, untuk faktor ini juga sudah cukup baik karena dalam menjalankan program ini, pembagian tugas untuk masing-masing staf/pegawai telah ada walaupun tidak dimuat dalam struktur organisasi. Staf pelaksana juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Gubernur Bali. Sikap atau

kecenderungan para pelaksana dinilai sudah baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak program ini dan menunjukkan dukungannya terhadap program ini dengan ikut sertanya beberapa Lembaga keuangan selaku pelaksana program. Jadi semua punya andil dalam pelaksanaan program ini. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, faktor ini merupakan yang paling krusial dalam implementasi ini. Banyak pelaku pariwisata terdampak Covid-19 yang belum mengetahui adanya kebijakan stimulus perekonomian, merasa informasinya kurang jelas dan informasi dari OJK tidak merata. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh baik terhadap proses implementasi program ini. Tetapi lingkungan politik tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses implementasi program ini.

Saran yang bisa diberikan sebaiknya dibuat indikator- indikator yang dapat dijadikan dasar untuk melihat keberhasilan program ini. Agar kedepannya dapat dilakukan perubahan untuk membuat membuat program ini dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Sebaiknya Pemerintah menciptakan program padat karya yang sementara menampung para tenaga kerja yang terkena PHK. Menyediakan modal kerja untuk UMKM, sehingga potensi dan kekuatan UMKM dapat dijadikan benteng dan kekuatan perekonomian nasional, dalam proses pemulihan perekonomian. Berbagai kebijakan seperti stimulus dan relaksasi benar-benar berjalan dilapangan untuk membantu pengusaha agar dapat bertahan selama pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

- Budiyanti, E. (2020). *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia. Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, XII(4)*, 19–24. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf
- Paramita, I. B., & Putra, I. G. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya*, 5(2), 57-65. Retrieved from <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/view/108>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Covid-19*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- Purwahita, A. R., Wardhana, P. B., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. (2021). Dampak COVID-19 Terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Suatu Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 68-80.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155. https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.2_0490
- Solichin, A. W. (2014). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataaan
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6(4), 445- 488.
- Wilson, C. A. (2006). *Public Policy: Continuity and Change*. New York: McGraw-Hill.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.